

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara memiliki ancaman tindak kejahatan di lintas batas. Salah satu kejahatan lintas batas di Indonesia adalah tindak kejahatan perdagangan manusia di sektor industri perikanan Indonesia yang melibatkan nelayan dan anak buah kapal (ABK) sebagai korbannya. Mereka diperjualbelikan seperti barang komoditas dagang dan dieksploitasi kerja guna menekan biaya operasional perusahaan. Korban tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia saja, akan tetapi juga berasal dari luar negeri dimana Indonesia kerap menjadi negara tujuan, transit ataupun penerima korban. Fenomena ini menjadi masalah sosial global menyangkut hak asasi manusia seorang individu yang seharusnya didapatkan. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku badan pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak, yaitu dengan menjalin kerjasama bersama *International Organization for Migration* (IOM) selaku organisasi internasional yang juga berfokus pada masalah perdagangan manusia, khususnya kerjasama dalam menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin secara detail antara KKP dan IOM dalam menanggulangi permasalahan ini dan mengetahui kondisi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Industri Perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *International Organization for Migration* (IOM)

## **ABSTRACT**

Indonesia as a developing country in Southeast Asia has a threat of crime across the border. One of the transnational crimes in Indonesia is the crime of human trafficking in the Indonesian fishery industry sector involving fishermen and crew as its victims. They are traded like commodity merchandise and exploited work to reduce operating costs. Victims are not only from Indonesia alone, but also from abroad where Indonesia is often the destination country, transit or victim recipients. This phenomenon is a global social issue concerning the human rights of an individual who should be earned. Therefore, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries as an Indonesian government agency needs assistance from various parties, namely by establishing cooperation with the International Organization for Migration as an international organization that also focuses on the problem of human trafficking, especially cooperation in tackling trade people in the fishery industry of Indonesia. This study aims to find out how the form of cooperation in detail between KKP and IOM in tackling this problem and know the condition of human trafficking in the Indonesian fishery industry.

**Keywords:** Human Trafficking, Indonesian Fishery Industry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, International Organization for Migration